

**PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DALAM
MENJAGA KETERSEDIAAN KEBUTUHAN PANGAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Donita Ega Stefani Sirait

191010012

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DALAM
MENJAGA KETERSEDIAAN KEBUTUHAN PANGAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh:

Donita Ega Stefani Sirait

191010012

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

TAHUN 2023

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Donita Ega Stefani Sirait

NPM : 191010012

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

Peran Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Dalam Menjaga Ketersediaan Kebutuhan Pangan Di Kota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi, fabrikasi dan tiruan sejenis lainnya”. Sejauh ini dan dalam pengetahuan penulis, naskah penelitian skripsi yang penulis lakukan terdapat pendapat orang lain dan juga dilakukan pengutipan sesuai dengan kaidah penulisan dan tertera pada daftar pustaka skripsi. kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jikalau pada kemudian hari ditemukan unsur-unsur yang melanggar kaidah penulisan skripsi dan kaidah lainnya, penulis bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku. Demikian pernyataan ini penulis tuliskan secara sadar dan dengan sebenarnya tanpa ada suruhan dan paksaan dari pihak manapun.

Batam, 28 Januari 2023



Donita Ega Stefani Sirati

191010012

**PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DALAM
MENJAGA KETERSEDIAAN KEBUTUHAN PANGAN DI KOTA BATAM**


SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Perolehan Gelar Sarjana

Oleh
Donita Ega Stefani Sirait
191010012

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Batam, 28 Januari, 2023


Aqil Teguh Fathani, S.I.P., M.I.P.

Pembimbing



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini melihat peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah kota Batam melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menjaga ketahanan pangan dan kebutuhan pangan di kota Batam secara berkelanjutan. Pada saat ini di Kota Batam sedang terjadi kekurangan pangan akibat dari lemahnya pengelolaan pangan, sehingga seringkali harga pangan menjadi tinggi. Adapun indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain adalah peran sebagai inovator, stabilisator dan modernisator. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dilakukan untuk dapat secara sadar dan mendalam melakukan wawancara kepada narasumber Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Wawancara dilakukan dengan aktor kepentingan untuk memperoleh data penelitian yang reliable dan aktual. Hasil penelitian yaitu: peran pemerintah Kota Batam dalam menjaga ketahanan pangan dan pertanian masih kurang efektif. Keaktifan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian hanya berfokus kepada kolaborasi terbatas dengan Dolog/Bulog dan tidak terjadi dengan pihak swasta, sehingga kebutuhan pangan seringkali bermasalah. Selain itu, lumbung pangan yang tersedia berjumlah 2 dan dinilai sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kota Batam. Partisipasi hanya berbentuk evaluasi mengontrol harga di pasar dan jarang dilakukan. Akibatnya adalah sulit bagi para petani, pedagang untuk menjual hasil panen kepada masyarakat lebih luas. Saran bagi pemerintah adalah harus dilakukan penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan yang efektif untuk dapat mengantisipasi kebutuhan pangan yang meningkat oleh masyarakat dengan antisipasi ketahanan pangan daerah.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Pertanian, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

ABSTRACT

Aims of research is to elaborates and determines the government's role in sustaining food security and agriculture needs in the city of Batam. The government's role as the primary actor is an obligation that must be met in order to maintain food availability. This study used a descriptive qualitative approach with in-depth interviews with Department of Food Security and Agriculture informants. To obtain reliable and current research data, interest actors were interviewed. The results of the study show: the role of the Batam City government in maintaining food security and agriculture still needs to be improved. The activity of the Food Security and Agriculture Office only focuses on limited collaboration with BULOG and does not occur with the private sector, so food needs are often problematic. In addition, there are two available food storages, and they need to be considered to meet the food needs of the people of Batam. Participation is only in the form of evaluation of controlling prices in the market and is rarely done. As a result, it is difficult for farmers and traders to sell their crops to the broader community. Suggestions for the government are that institutional strengthening and effective food governance should be carried out to meet the increasing food needs of the community.

Keywords: *Food Security, Agriculture, Public Service, Governance; Department of Food Security and Agriculture*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus karena telah memberikan segala kesempatan, kesehatan dan kemudahan dalam penulisan skripsi yang merupakan bagian dari syarat wajib untuk menyelesaikan pendidikan tinggi di program studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia. Dengan hari yang syucu dan kelapangan hari serta keterbatasan yang dirasakan, penulis secara tulus mengucapkan rasa terimakasih mendalam karena skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elvi Husda, S.Kom., M.Si.
2. Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom;
3. Ketua Program Studi Administrasi Negara Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP;
4. Bapak Aqil Teguh Fathani, S.I.P., M.I.P. selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
5. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Seluruh Anggota Dan Staff Dinas Pendidikan Kota Batam, yang sudah mengizinkan dan bersedia membantu penulis menyelesaikan penelitian.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, yang sudah memberi semangat, kasih sayang dan doa tulus kepada penulis; serta
8. Teman-teman tercinta pada Program Studi Administrasi angkatan tahun 2019.

Semoga Tuhan Yesus membalas kebaikan dan selalu mencurahkan cahaya kebaikan dan kesehatan bagi kita semua, Aamiin.

Batam, 28 Januari 2023

Donita Ega Stefani Sirait



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS PENELITIAN.....	ii
SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian	7
1.3. Batasan Masalah Penelitian.....	7
1.4. Rumusan Masalah Penelitian.....	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kajian Teori Penelitian.....	9
2.1.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Konsep Pelayanan Publik.....	9
2.1.2 Ketahanan dan Kualitas Pangan.....	13
2.1.3 Diversifikasi Produk Pangan dan Konsumsi Masyarakat	17
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Sifat Penelitian.....	24
3.3 Lokasi dan Periode Penelitian.....	25
3.4 Sumber Data Penelitian	26
3.5 Metode Pengumpulan Data	26
3.6 Defenisi Operasional Penelitian	28
3.7 Metode Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.....	32

4.1.1 Tujuan, Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	32
4.1.2 Kinerja Pelaynan Publik	35
4.2 Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam Menjaga Ketersediaan Pasokan Kebutuhan Pangan	39
4.3 Tantangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Menjaga Ketersediaan Kebutuhan Pangan di Kota Batam	51
4.3.1 Hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Stok Pangan di Kota Batam.....	51
4.3.2 Tantangan Pelaksanaan Pengelolaan Stok Pangan di Kota Batam	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	61
Lampiran 1: Pedoman Wawancara dan Dokumentasi	61
Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup	68
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian	23
Gambar 3.1 Alur Analisis Data Berdasarkan Teori Sugiyono	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pangan Nasional Tahun 2017-2022	3
Tabel 1.2 Data Rekapitulasi Pangan Kota Batam Tahun 2022	5
Tabel 3.1 Periode Penelitian.....	26
Tabel 4.1 Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam....	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan terhadap pangan sangat erat dengan kebutuhan manusia karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar dan menjadi sumber utama kehidupan. Pangan sangatlah erat dengan kebutuhan manusia, karena menyangkut kebutuhan dasar yang paling penting dan strategis bagi sumber kehidupan (Pasira & Rosada, 2018). Pangan diartikan sebagai sumber dasar atau kebutuhan pokok utama yang pemenuhannya menjadi urgensi dasar manusia sebagai makhluk hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu dalam penyelenggaraan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pangan bertujuan untuk peningkatan kapasitas kemampuan para petani dan masyarakat dalam menghasilkan produk pertanian secara mandiri atau kolektif ataupun bersama-sama dan sertamampu menyediakan pangan yang beranekaragam, dapat memenuhi segala aspek keamanan, mutu, gizi dan layak dikonsumsi oleh masyarakat (Armawi, 2016).

Upaya untuk mempertahankan keberadaan pangan juga dapat dinilai dari stabilitas harga pangan yang stabil, wajar dan mampu dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, memberikan akses kemudahan terhadap pangan dalam jangkauan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang termasuk daerah rawan gizi dan pangan, peningkatan kesadaran dan ilmu pengetahuan dasar dan berkelanjutan tentang pengelolaan pangan, dan pangan yang bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat (Arsyad, 2018).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pangan, terdapat turunan yaitu berbentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 yang mendetailkan tentang ketahanan pangan nasional. Dijelaskan bahwasanya pangan dan ketahanan pangan menjadi sektor serius yang berhubungan langsung dengan pembangunan nasional sehingga berdampak baik bagi pertumbuhan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten dan terampil. Perwujudan ini merupakan implikasi dari tersedianya jenis pangan yang berkualitas, beragam, harga stabil dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum (Azahari & Hadiutomo, 2014).

Sebagai negara yang masih berstatus sebagai negara berkembang, Indonesia dari sektor ketahanan dan kebutuhan pangan nilai masih rendah karena tidak terpenuhinya struktur ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan (Mulyani et al., 2020). Masih banyak penduduk yang kesulitan mengakses pangan sehingga kebutuhan mereka tidak tercukupi, terutama pada rumah tangga yang tergolong miskin dan pendapatan ekonomi rendah. Berdasarkan data Produksi Pangan Nasional Tahun 2015-2022 ada fluktuatif pangan di Indonesia dari produksi dan konsumsi beras dan jagung. (Tabel 1)

Tabel 1. 1 Data Pangan Nasional Tahun 2017-2022

Komoditas (Ton/Tahun)		Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beras	Produksi	423.402	313.785	397.693	411.862	422.507	434.707
	Konsumsi	92,70	88,30	83,40	82,20	81,40	81,42
Jagung	Produksi	311.764	309.221	366.031	369.347	358.880	326.441
	Konsumsi	0,90	0,70	0,80	1,40	0,70	0,70
Ubi	Produksi	1.025.641	890.898	778.806	1.073.314	881.950	923.797
Kayu	Konsumsi	12,30	7,90	7,20	8,30	11,40	11,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), Tahun 2022

Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwasanya produksi beras yang ada dari tahun 2017-2022 diantaranya adalah beras, jagung dan ubi kayu. Produksi beras mengalami peningkatan yang stabil, akan tetapi konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat mengalami hal sebaliknya yaitu penurunan. Pangan jagung dari tahun 2017-2020 mengalami kenaikan stabil, akan tetapi dalam dua tahun 2021-2022 terjadi penurunan produksi. Akan tetapi pada konsumsi jagung mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2017-2020 dan penurunan pada tahun 2020-2022.

Sikap fluktuatif ini berindikasi bahwa produksi sangat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Pangan ubi kayu dalam sistem produksi mengalami statistik fluktuatif yang seringkali terjadi, pada akhirnya penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020-2022. Konsumsi yang dilakukan masyarakat terhadap ubi kayu tersebut mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2015 sampai 2017 mengalami penurunan ditahun berikutnya 2018 serta terus mengalami kenaikan konsumsi di tahun 2019 sampai tahun 2022.

Korelasi sikap fluktuatif data statistik ini sangat berindikasi bahwa pangan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, Arsyad (2018) mengungkapkan bahwa harga pangan, pertumbuhan penduduk, transformasi lahan pertanian kepada non-pertanian berimplikasi buruk. Hal ini terjadi karena konsumsi masyarakat dari masa ke masa mengalami peningkatan yang stabil. Lebih lanjut krisis pangan Indonesia juga seringkali diakibatkan karena stok penyimpanan barang terbatas, terutama kepada pangan-pangan pokok sesuai dengan tabel diatas. Sehingga diperlukan upaya dan peran strategi pemerintah untuk menciptakan ketersediaan pangan atau pengadaan pangan yang cukup untuk menjaga ketahanan pangan secara menyeluruh.

Disisi lain dari sudut pandang kebutuhan terhadap konsumsi publik terhadap komoditas utama beras mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2021, disebutkan bahwasanya terdapat 278 juta jiwa penduduk Indonesia yang konsumsi pangan terhadap jumlah penduduk tersebut sebanyak 70 juta ton/tahun. Sedangkan untuk mengakses dan memperoleh beras semakin lama semakin mengalami hambatan karena peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat, mengingat tingkat permintaan semakin meninggi sedangkan jumlah produksi tidak bertambah secara signifikan.

Hal sejalan dengan pernyataan Laksdiasari (2021) yaitu akibat dari kebutuhan yang besar terhadap pangan pokok, sebagian provinsi-provinsi di Indonesia melakukan kegiatan aktifitas impor beras yang jumlahnya cukup beragam dan dinilai besar, akibatnya adalah sulit untuk menekan laju perdagangan

beras sehingga penyebaran tidak merata dan sulit dijangkau bagi daerah lain. Selanjutnya, pemenuhan terhadap konsumsi pangan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagai bagian dari pangan pokok diharapkan ketersediaan mereka harus jelas dan terlaksana dengan baik sehingga dipersiapkan secara mutlak (Fairhurst & Dobermann, 2002; Jaya, 2018).

Tabel 1. 2 Data Rekapitulasi Pangan Kota Batam Tahun 2022

Kom	Sagulung		Sei Beduk		Batu Aji		Nongsa		Bulang		Sekupang		Batam	
	ha	kg	ha	kg	ha	kg	ha	kg	ha	kg	ha	kg	ha	kg
Ubi Kayu	1	372	43	43	1	4	23	250	4	9	1	-	1	740
Jagung	14	75	6	2	3	16	7	6	7	34	3	10	80	285
Kangkung	11	38	25	106	1	2	3	8	6	2	4	7	1	4

Selanjutnya, kebutuhan pangan di Kota Batam terhadap komoditas beras terjadi peningkatan sehingga diperlukan perluasan perdagangan dan cadangan pangan agar terpenuhi kecukupan pangan. Kompleksitas permasalahan di Kota Batam juga disebabkan karena tidak memiliki lahan yang cukup untuk akses pertanian dan perkebunan sehingga sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat kota Batam yang jumlah penduduknya yang tinggi. Prombelamatika yang sedang terjadi diharapkan mampu diatasi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota Batam untuk memberikan suatu peran yang efektif dalam pengendalian pangan, pengembangan pangan, pembinaan pangan, monitoring dan evaluasi pangan dan pertanian secara rutin. Pemenuhan terhadap konsumsi pangan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah serta ketersediaan beras mutlak harus untuk dipersiapkan.

Sebagai daerah yang tidak diprioritaskan sebagai daerah pertanian atau lebih keapda daerah yang berperan pada sektor industri dan teknologi, juga perlu

diperhatikan tentang kondisi pangan dan pertanian masyarakat setempat agar dapat terpenuhinya kebutuhan pokok mereka masyarakat kota Batam. Dalam pemenuhan kebutuhan pokok tersebut diperlukan solusi terhadap masalah yang sering dihadapi oleh petani. Saat ini sebagai contoh kebutuhan masyarakat terhadap sayur hijau mencapai 79.200 ton/bulan, sedangkan realisasi dilapangan atau pemenuhan kebutuhan hanya mencapai 25.095 ton/bulan.

Pemerintah sangat perlu untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakatnya melalui pelaksanaan-pelaksanaan program dan kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol dan mengendalikan harga, stabilisasi produk dan harga, sistem transparansi dan logistik pangan, pengembangan difersifikasi pangan dan pengembangan potensi pangan-pangan lokal. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk suatu instansi resmi yang mengatur pangan daerah seperti badan ketahanan pangan daerah yang diberikan kewenangan khusus dalam pengelolaan pangan, penguatan sistem logistik pangan, pengentasan wilayah rentan rawan pangan dan pengembangan potensi pangan lokal. Selain itu juga ada penugasan kolaborasi dengan instansi terkait seperti bulog/dolog dalam menyerap produksi petani sehingga mampu mengurangi perubahan harga yang terjadi secara mendadak.

Sesuai dengan deskripsi atau penjelasan peneliti pada bagian latar belakang penelitian, peneliti merasa sangat tertarik untuk mengangkat tema dengan ketahanan pangan daerah dengan uraian judul “Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam Menjaga Ketersediaan Pasokan Kebutuhan Pangan”.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Sesuai dengan penjelasan latar belakang penelitian, penulis berhasil mengidentifikasi masalah pada penelitian yang dilakukan yaitu kerawanan pangan yang mengancam Kota Batam dikarenakan minimnya lahan pertanian, tingkat konsumsi dan jumlah penduduk yang tinggi serta karakteristik sebagai kota industri. Oleh karena itu dibutuhkan peran dari dinas ketahanan pangan dan pertanian kota Batam dalam menjaga kebutuhan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan khususnya di Kota Batam.

1.3. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan deskripsi yang peneliti lakukan pada sub-judul latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian, peneliti menilai bahwasanya terdapat batasan yang peneliti lakukan untuk dapat secara fokus dalam menguji penelitian. Batasan tersebut merupakan keterbatasan peneliti dalam mengulas penelitiannya sehingga hanya terfokus kepada peran dinas ketahanan pangan dan pertanian kota Batam dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pangan di kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana peran dinas ketahanan pangan dan pertanian kota Batam dalam menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di kota Batam?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dinas ketahanan pangan dan pertanian kota Batam dalam menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Uraian deskripsi pada latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah penelitian dan rumusan masalah penelitian, penulis melakukan penelitian dengan memiliki beberapa tujuan yang diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dinas ketahanan pangan dan pertanian kota Batam dalam menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di Kota Batam; dan
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang terjadi dalam menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di Kota Batam

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan memiliki beberapa poin kebermanfaatan yang merupakan implikasi penelitian. Hasil penelitian mencakup beberapa hal yang dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu untuk menambah aspek wawasan pengetahuan dalam bidang keilmuan administrasi negara serta dapat digunakan sebagai bahan referensi terhadap program kebijakan pemerintah dalam pengembangan kebijakan masa depan

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini mampu untuk memberikan informasi kepada aktor kepentingan dan lingkungan masyarakat mengenai peran dinas ketahanan pangan dan pertanian kota Batam dalam menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan dan sebagai referensi penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Penelitian

2.1.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Konsep Pelayanan Publik

Peran pemerintah merupakan bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengakomodir, berpartisipasi, mengontrol dan mengevaluasi kepada masyarakat. Peran yang dapat dilakukan bersifat dinamis karena mampu berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi yang terdapat dilapangan dan atau artian relatif bebas pada orang yang melakukan peran tersebut (Siagian, 2000). Selain itu, defenisi peran juga berkaitan dengan tindakan dan perilaku dalam hal positif untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kedudukannya. Sebaliknya, jika ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan terdapat pelanggaran atau sikap negatif maka berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat (Siagian, 2002).

Peran yang dilakukan oleh pemerintah menurut Poerwodarminta (1995) merupakan upaya tindakan dalam suatu peristiwa yang pada prinsipnya harus dilakukan dengan maksimal untuk memberikan pesan dan pandangan positif kepada masyarakat umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran merupakan upaya dalam bentuk sikap aatau tindakan yang mampu diraih oleh orang yang memiliki kedudukan dalam struuktur lapisan masyarakat sehingga mampu melakukan perubahan atan tindakan berdampak besar.

Pada prinsipnya, dominasi pada peran atau peran yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan adanya suatu fungsi, penyesuaian diri dalam proses pendekatan kepada masyarakat sehingga yang mampu memberikan peran biasanya adalah seseorang yang dinilai mampu dan memiliki kedudukan atau posisi pada suatu jabatan. Konsep peran menurut Soekanto (2008) mencakup kepada 3 poin sebagai berikut:

1. Segala bentuk peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan kedudukan seseorang atau posisi seseorang pada lapisan struktur masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam aturan yang membimbing seseorang atau kelompok dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
2. Sikap dan perilaku konsisten yang dilakukan oleh seseorang kepada masyarakat sebagai wujud dari implementasi suatu lembaga, instansi dan organisasi
3. Perilaku individu bagi lapisanstruktur masyarakat

Terdapat poin-poin penting yang gberkaitan langsung dengan peranan pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya yaitu (1) berperan sebagai lapisan struktur masyarakat yang seharusnya dipertahankan kelangsungannya; (2) peranan yang dilaksanakan tersebut seharusnya dilekatkan kepada individu yang mampu dan sanggup melaksanakannya; (3) Jika berkenan dan mampu melaksankannya harus tahan terhadap sikap yang sewaktu-waktu berubah atau tahan terhadap konflik dan permasalahan yang kerap kali muncul sewaktu-waktu.

Korelasi poin-poin tersebut berhubungan karena sifat pemerintah adalah melayani dan mampu mengatur masyarakat, menurut Siagian (2002) pemerintah pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur, melayani dan memberikan peran partisipasinya. Fungsi-fungsi ini merupakan sifat baku yang ditetapkan kepada setiap sistem pemerintahan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat agar tumbuh dan sejahtera. Korelasi ini memberikan makna bahwa peran pemerintah secara mutlak diartikan sebagai upaya untuk mengelola dan mengatur masyarakat dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Point-point utama dalam peran aktif pemerintah dalam hal ini yaitu dinas-dinas yang merupakan bagiannya dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu sebagai penyedia layanan publik, sebagai pengaturan, sebagai fungsi pembangunan, sebagai fungsi perwakilan dan terakhir sebagai fungsi koordinasi (Siagian, 2002). Kelima point tersebut memiliki makna yang saling berkaitan, sebagai penyedia layanan publik harus mampu untuk mengelola dan mengatur segala bentuk pelayanan yang diberikan secara maksimal sehingga mampu dinikmati oleh masyarakat.

Hubungan ini bertujuan untuk mempercepat pergerakan pembangunan dan pembangunan manusia sehingga mampu memainkan perannya untuk perwakilan dan melakukan negosiasi, kolaborasi, dan koordinasi kepada pihak lainnya. Perencanaan terhadap pembangunan daerah membutuhkan ketahanan dan sikap lainnya dibutuhkan oleh pemerintah sebagai aktor

penting yang memiliki kekuatan dan peran penting dalam memberikan pelayanan kepada publik atau pelayanan kepada masyarakat.

Secara lebih jelas, detail dan konkrit maka peran pemerintah dalam pembangunan nasional adalah berperan utama sebagai inovator, stabilisator dan modernisator (Siagian, 2000). Secara detail diuraikan sebagai berikut:

1. Innovator, peran pemerintah sebagai inovator diartikan sebagai tindakan wajib yang dilakukan pemerintah untuk mampu meningkatkan legalitas dimata masyarakat, legalitas tersebut dapat dilakukan sikap konsisten dengan pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Poin utama dalam inovator adalah inovasi yang diciptakan dalam lingkungan birokrasi bersifat konseptual, inovasi sistem, prosedur dan model baru dalam bekerja.
2. Stabilisator, merupakan sikap pemerintah dalam mewujudkan suatu transformasi baru tanpa adanya gejolak sosial, gejolak sosial dimaknai sebagai ancaman bagi daerah dan keutuhan nasional. Peran stabilisator dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi bijak melalui pendekatan persuasif, bertahap serta berkelanjutan.
3. Modernisator, dapat berupak suatu pembangunan daerah untuk mampu bersaing dengan daerah-daerah lainnya menjadi daerah mandiri, berkepribadian, memilik kemampuan manajerial dan pengelolaan kekayaan sehingga memiliki daya saing. Selain itu mampu

menciptakan sumber daya manusia yang produkti, stabil dalam kehidupan sosial politik demokratis dan berorientasi pada masa depan.

Berdasarkan orientasi peran yang dideskripsikan dengan ciri-ciri dan fungsi yang relevan penelitian ini menganut kepada peran pemerintah yang dilakukan dengan sikap inovator, modernisator dan stabilisator untuk mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan untuk kebutuhan masyarakat kota Batam.

2.1.2 Ketahanan dan Kualiatas Pangan

Defenisi atau pengertian ketahanan pangan menurut Badan Ketahanan Pangan Indonesia yang secara spesifik berwenang dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia yaitu suatu upaya yang diperlukan dalam tata kelola informasi pemertan potensi daerah pangan dan kerentanan daerah pangan. Kondisi ketahanan pangan daerah sangat ditentukan oleh kesiapan masyarakat dalam peningkatan jumlah produksi, konsumsi dan distribusi pangan (Mulyani et al., 2020). Dari sudut pandang lain yaitu aspek kerawanan pangan dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu diantaranya adalah ketersediaan pangan; akses pangan; kesehatan dan gizi; aspek kerentanan pangan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan dan kejadian bencana alam (Subekti et al., 2021).

Keempat aspek yang digunakan untuk menjaga ketahana pangan diperlukan peran pemerintah dan aktor kepentingan dalam menjaga luas lahan pertanian agar jumlah lahan pertanian tidak mengalami pengurangan yang

signifikan atau tidak berkurang setiap tahunnya. Kerentanan sering terjadi karena berkurangnya lahan produksi seperti beras dan jagung karena luas tanah yang tersedia selalu dialihfungsikan menjadi lahan industri atau lahan non-pertanian (Van Oort et al., 2015). Sebaliknya adalah dalam menunjang sistem produksi pangan juga didukung oleh sistem pengairan yang cukup, akan tetapi ini semua tidak berguna jika secara perlahan setiap tahunnya lahan dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian. (Ye et al., 2014). Karena permasalahan tersebut, sangat diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk peran aktif dan program yang nyata dalam meningkatkan produktifitas pertanian pangan di Indonesia, salah satu yang paling penting adalah area irigasi (Panuju et al., 2013).

Sistem peralihan fungsi lahan pertanian memberikan dampak besar dan buruk bagi ketersediaan pangan di Indonesia. Alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menyebabkan hilangnya produksi beras, jagung, ubi-ubian dan biji-bijian sehingga diperlukan tindakan tepat guna untuk mempertahankan pangan Indonesia adalah melalui reformasi agraria. Menurut Waryanta (2016) program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Akan tetapi dalam implementasi reformasi agraria belum mampu mengatasi permasalahan pangan perlu adanya penekanan dalam budidaya tanaman dan peternakan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi secara maksimal.

Menurut Rimadiani & Daryanto (2016) menjaga ketahanan pangan diperlukan suatu komitmen bersama antar kepada daerah dan aktor

kepentingan, kerjasama yang dilakukan mampu untuk menjaga ketersediaan pangan, penekanan harga yang relatif berubah-ubah, sehingga meminimalisir perkembangan daerah rawan pangan. Oleh karena itu diperlukan perhatian dan peran pemerintah untuk menjaga pangan agar konsumsi masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kondisi saat ini yang terjadi merupakan bentuk kelalaian yang selama ini difokuskan kepada pembangunan nasional, sehingga aspek pertanian seringkali dihiraukan.

Menurut Armawi (2016) jumlah dan kualitas pertanian Indonesia belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri dan sangat tergantung pada pangan impor, tindakan ini sangat miris karena daerah yang memiliki lahan pertanian dominan rentan terhadap ketahanan pangan. Perlu adanya penguatan ketahanan pangan oleh instansi atau lembaga pemerintahan untuk melakukan manajemen ketahanan pangan yang lebih kompleks dan didukung sistem organisasi modern demi memperkuat ketahanan pangan lokal.

Selanjutnya adalah upaya menjaga ketahanan berkaitan erat dengan kualitas pangan yang berhubungan langsung dengan sistem produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan. Menurut Putra (2019) kualitas pangan sebagai indikator penting dalam menilai kepuasan dan harapan dari para pelanggan. Sejalan dengan kualitas pangan diartikan sebagai sumber energi tubuh yang dikonsumsi dan yang mengandung nutrisi, gizi memberikan dampak positif.

Konsep utama dalam defenisi pangan merupakan pangan atau makanan dasar yang aman dan terbebas dari pencemaran biologis dan kimia serta secara hal-hal yang dapat mengganggu dan membahayakan manusia (Wardani et al., 2019). Kualitas pangan adalah tolak ukur produk yang dapat memenuhi sumber energi bagi tubuh agar bisa maksimal dan tidak memberikan dampak negatif dalam tubuh. Secara khusus stimulus dan insentif yang dikeluarkan untuk itetap menjaga kinerja di sektor pertanian dan perikanan, antara lain: program padat karya pertanian; program padat karya perikanan; banpres produktif UMKM sektor pertanian; subsidi bunga mikro/kredit usaha rakyat; dan dukungan pembiayaan koperasi dengan skema dana bergulir.

Saat ini pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah secara bersama - sama mendorong dalam menyusun kebijakan baku untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan daerah agar tidak terjadi kerentanan pangan dan meningkatnya daerah rawan pangan, hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah melalui surat edaran SET.M.EKON.3/06/2021 yang berisi poin-poin penting, diantaranya adalah

1. Melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian perizinan, serta persetujuan ekspor/impor.
2. Transformasi usaha-usaha pertanian dari tradisional keapda digitalisasi dengan tema dasara pemulihan pangan dan ekonomi nasional.

3. Kolaborasi lintas instansi dan lembaga dalam penyebaran dan distribusi hasil pertanian dari sentra pertanian kepada daerah-daerah rawan pangan dan rentan pangan,
4. Kecukupan konsumsi dan jangkauan oleh masyarakat
5. Pengembangan sistem logistik dan penyimpanan
6. Aksesibilitas melalui transportasi darat, laut dan udara dan efektif dan efisien, dan
7. Pembentukan lembaga nasional dan daerah dibawah Kementerian Pertanian dan BUMN dalam penguatan ekosistem pangan nasional dan daerah.

2.1.3 Diversifikasi Produk Pangan dan Konsumsi Masyarakat

Menurut Hariyadi (2017), keanekaragaman pangan atau diversifikasi pangan merupakan tindakan dalam pemulihan sistem pangan yang tidak hanya bergantung kepada satu jenis pangan atau mampu memilih dan mengkonsumsi jenis pangan lainnya. Dalam hal ini meliputi konsumsi pribadi dan kelompok yang hanya membatasi dirinya untuk mengkonsumsi satu produk sejenis dan tidak mengkonsumsi pangan yang berbeda karena berbagai alasan. Selain itu, pertimbangan konsumsi rumah tangga dalam memilih pangan dan makanan pokok berdasarkan pada aspek produksi, pengelolaan, konsumsi pangan, anekaragam pangan, minimalisir ketergantungan terhadap pangan tertentu.

Konseptual yang disusun dalam upaya keanekaragaman pangan atau diversifikasi pangan merupakan hal yang telah lama dikampanyekan dan

bukan merupakan konsep baru yang diperkenalkan. Istilah ini telah diucapkan pemerintha melalui kebijakan-kebijakan dalam pengautan pangan, pertanian dan peternakan dalam membangun Indonesia dan meningkatkan perumbuhan keanekaragaman konsumsi masyarakat.

Menurut Hariyadi (2017) keanekaragaman pangan merupakan uuapaya dasar yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas konsumsi manusia yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sehingga terdorongnya penciptaan produksi yang lebih beragam untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Penetapan konsep diversifikasi tidak hanya terfokus atau terbatas dengan pangan makanan pokok, melauikan juga untuk mampu meminimalisir terjadinya overkonsumsion terhadap konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non-beras.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021, Produksi Pangan adalah merupakan aktifitas menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Yanuari (2017) mendeskripsikan bahwasanya produksi pangan pertanian merupakan hasil yang didapatkan dari lahan pertanian dan perkebunan dalam waktu tertentu dan periode tertentu yang secara statisitik dapat diukur untuk menentukan dan menandakan besar potensi komidit pertanian. Produksi dan atau hasil pertanian dalam arti luas tergantung dari faktor genetik/varietas yang ditanam termasuk antara lain tanah, iklimi dan iteknologi yang dipakai. Aarti sempit terdiri dari variasi tanaman, tanah, iklim, faktor-faktor non teknis seperti keterampilan, biaya/sarana produksi pertanian dan alat-alat yang

digunakan. Faktor yang mempengaruhi produksi pertanian terbagi atas faktor genetik, alam, tenaga kerja, modal dan manajemen (Banowati, et.al., 2017). Lebih lanjut dalam pemenuhan tercapainya konsumsi pangan menurut Salvatorei (2018) kepuasan individu terhadap suatu produk pangan atau pertanian tergantung daripada masyarakat menilai produk tersebut dalam bentuk kualitas dan nilai gizi yang terkandung.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan pembacaan dan identifikasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk melihat dan menganalisa teori-teori dan temuan-temuan penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penulis serta memiliki permasalahan yang mirip oleh penulis, sehingga perlu dijadikan sebagai acuan. Adapun fokus penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau sumber referensi sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asril Gunawani (2017), dengan judul “Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Indrapuri”. Hasil penelitian upaya peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah melalui peran dinas pertanian adalah mampu meningkatkan penghasilan produksi petani lokal sehingga memberikan nilai kesejahteraan kepada masyarakat lokal. Implikasi ini terjadi karena signifikansi pertumbuhan ekonomi lokal, pengurangan angka kemiskinan, keterbukaan lapangan pekerjaan, dan mampu menyeimbangkan ketersediaan

lapangan kerja sehingga sumber daya manusia yang ada mampu dimanfaatkan secara maksimal.

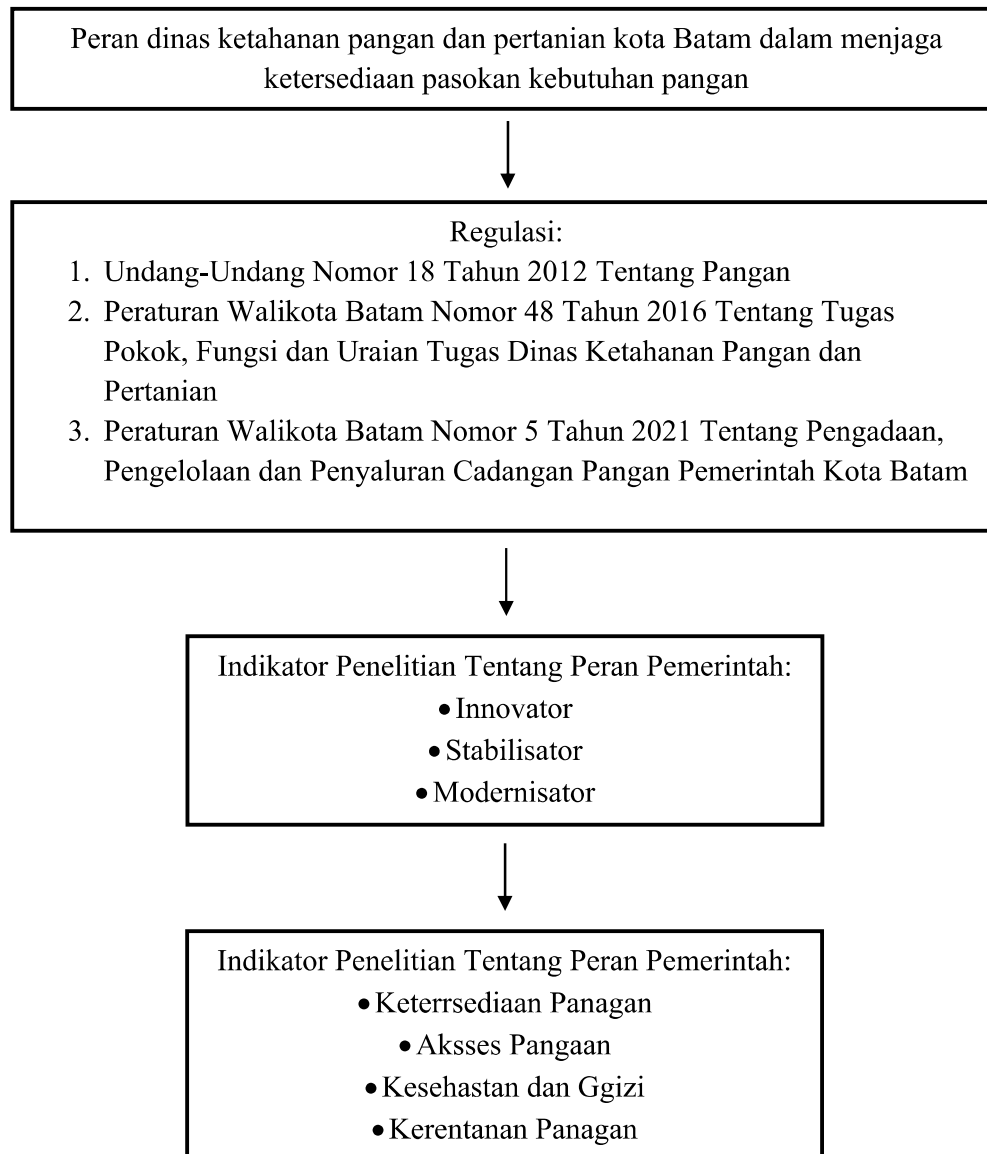
2. Penelitian Febriana (2019) yang berjudul “Strategi dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa masih belum ada optimalisasi dan kinerja minim dari pemerintah setempat. Kendala yang dihadapi cukup beragam sehingga program-program yang telah direncanakan menjadi terhambat.
3. Penelitian Usmadi (2013) tentang “Persepsi pendapat masyarakat tentang peran pemerintah dalam pengembangan sektor produksi dan distribusi pangan di desa Mattoanging, kabupaten Bulukumba”. Hasil penelitian: sebagian besar yang menjadi pelaku ekonomi pada sektor produksi dan distribusi pangan merupakan petani laki-laki dengan rata-rata usia diatas 35 tahun.
4. Penelitian Asril Gunawan (2017) tentang “Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Indrapuri”. Hasil penelitian tersebut yaitu dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Aceh Besar adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan perumbuhan sektor pertanian sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat secara bersamaan. Pemanfaatan lingkungan sumber daya alam dan lahan yang berpotensi untuk lahan pertanian dilakukan secara maksimal, kerjasama dengan masyarakat lokal dan perangkat desa dilakukan evaluasi secara rutin.

5. Penelitian Sri Jusnaeni (2017) tentang “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sektor Pertanian di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto”. Hasil penelitian adalah peran pemerintah daerah dalam penyuluhan belum terlaksana secara optimal kepada masyarakat sehingga peningkatan produksi pertanian tidak terjadi peningkatan. Keterbatasan ini terjadi karena pertemuan rutin atau kepadatan jadwal pemerintah karena kondisi daerah yang tidak menentu sehingga diperlukan pengaturan jadwal tata kelola yang lebih baik.
6. Penelitian Yanuar Fiandana, Mochammad Makmur, Imam Hanafi (2015) “Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Malang”. Hasil penelitian dengan menggunakan metode matriks SWOT menghasilkan temuan bahwasanya kerjasama pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Pelaksana dan Penyuluhan (BKP3) telah berupaya dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan lumbung pangan, percepatan keanekaragaman pertanian, konsumsi beragam, kualitas dan kuantitas gizi sehingga layak untuk dikonsumsi serta peningkatan kemampuan masyarakat untuk dijadikan contoh sebagai desa mandiri di Kabupaten Malang.
7. Penelitian Dini Maharani Arum Rimadianti, Arief Daryanto, Yayuk Farida Baliwati (2016) “Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kota Tangerang”. Hasil penelitian berdasarkan analisis SWOT yaitu strategi alternatif yang dilakukan oleh pemerintah melalui peningkatan kolaborasi dalam bentuk *triple-helix* antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pertanian dan perdagangan. Korelasi ditekankan

kepada interaksi lintas aktor dalam penemuan pangan, aksesn pangan, kualitas dan kuantitas pangan, pemanfaatan lahan perkotaan dan lahan hijau untuk dijadikan lahan pertanian.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Ketahanan Pangan merupakan sektor paling penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia agar terciptanya kualitas sumber daya manusia yang bermutu, cerdas, dan dapat diandalkan. Ketahanan memiliki sistematika yang kompleks jika tidak mampu untuk dikendalikan, multi-efek tersebut secara langsung berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat, ekonomi, pendidikan, sosial dan hukum manusia sebagai makhluk sosial. Diperlukan suatu peran aktif dan strategis dari pemerintah nasional dan atau pemerintah daerah untuk melaksanakan perannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kualitatif dalam penelitian merupakan penelitian sistematis yang mampu mengolah secara jelas dan terstruktur terkait penelitian sosial manusia, sehingga mampu menemukan hasil yang lebih jelas dan konkrit (Creswell, 2017). Menurut Sugiyono (2011) penelitian kualitatif deskriptif mampu mengungkap masalah sosial secara dalam sehingga hasilnya mampu memberikan gambaran pemecahan masalah. Signifikansi penelitian yang dilakukan sangat sesuai dengan metode kualitatif karena melihat permasalahan sosial dari sektor ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sehingga diperlukan interaksi yang mendalam dengan aktor kepentingan pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk memecahkan permasalahan pangan di Kota Batam.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan menggunakan variabel bebas, menurut Sugiyono (2011) variabel bebas yang digunakan mampu secara eksplisit untuk memecahkan permasalahan penelitian sosial. Selain itu juga dapat dijadikan acuan dengan penelitian selanjutnya untuk melihat kemampuan hasil penelitian yang relevan. Penggunaan kualitatif dilakukan sebagai upaya untuk menghasilkan temuan yang dapat berupa kata-kata atau lisan dari sikap dan perilaku yang sedang diamati.

Diasumsikan bahwa realitas bersifat subjektif dan ganda dikarenakan pada hakekatnya setiap orang dan kelompok memiliki penilaian masing-masing dalam menggerakkan sikap perilakunya. Point dari peran seseorang atau kelompok membutuhkan interaksi intens peneliti dengan desain mendalam untuk memahami keadaan sekitar yang faktual (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian yang sedang dilakukan, peneliti memberikan hasil dari realitas data yang ditemukan dilapangan sesuai dengan informasi dari temuan wawancara dilapangan.

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian

3.3.1 Lokasi

Peneliti melakukan penelitian di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, di Jalan Raja Ali Haji, Nomor 3, Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, 29444, Provinsi Kepulauan Riau.

3.3.2 Periode Penelitian

Periode penelitian peneliti dilakukan dari mulai dari tanggal pemberian izin penelitian untuk jangka waktu kurang lebih 6 bulan. Untuk lebih rinci, periode penelitian bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Periode Penelitian

No	Kegiatan	2022			2023		
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Studi Pustaka						
2	Penyusunan Proposal						
3	Pengumpulan Data						
4	Pengolahan Data						
5	Analisis Hasil Penelitian						
6	Penyusunan Laporan						
7	Penyerahan Laporan						
8	Sidang Hasil						

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder, sumber primer merupakan perolehan data penelitian melalui melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang bersangkutan dengan fokus penelitian yang telah direncanakan. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari hasil dokumentasi melalui perantara yang terkait penelitian mengenai Peran Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Menjaga Ketersediaan Kebutuhan Pangan Kota Batam.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi salah satu cara yang paling strategis dalam penelitian, dalam penelitian ini terdapat dua hal penting dalam teknik pengumpulan data yang terdiri dari instrumen penelitian dan pengumpulan data penelitian (Sugiyono, 2016). Instrumen penelitian dalam penelitian ini berupa alat-alat bantu

yang digunakan peneliti dalam memperoleh data penelitian. Diantara alat-alat yang digunakan adalah alat perekam, kamera handphone, pedoman wawancara dan buku catatan. Adapun pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi penelitian.

1. Wawancara

Wawancara penelitian adalah wawancara langsung dengan informan atau narasumber yang kompeten, menguasai materi dan pembahasan sehingga jawaban yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam serta 5 orang petani dan 5 orang pedagang sayuran dan buah di Kota Batam.

2. Observasi

Observasi penelitian dilakukan dengan terjun langsung kelapangan atau ikut terlibat langsung dalam melihat segala aktifitas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan topik penelitian.

3. Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi adalah segala peristiwa yang dicatat dan merupakan rangkaian kegiatan yang telah berlalu dan atau telah terjadi dalam bentuk gambar, foto, video, sketsa dan lain-lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dalam bentuk rekaman dan foto menggunakan handphone saat berlangsungnya wawancara.

3.6 Defenisi Operasional Penelitian

Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan pada sifat yang mudah diamati, mempunyai rumusan yang jelas dan pasti serta tidak membingungkan. Definisi operasional adalah unsur utama yang sangat penting dalam penelitian karena menjadi alat ukur untuk menilai suatu peristiwa yang dapat menghasilkan suatu temuan baru. Dalam memberikan kemudahan dalam proses pengukuran variabel penelitian ini, variabel yang dibahas didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kota Batam melalui kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah. Diantaranya adalah regulator, fasilitator dan dinamisator. Regulator ditujukan karena pemerintah sebagai aktor penting dalam pembuatan kebijakan, fasilitator dimaksudkan mampu untuk menyediakan, memperoleh dan memfasilitasi masyarakat. Sedangkan dinamisator yaitu sikap pemerintah yang fleksibel sehingga pola komunikasi dan kerjasama dapat dilakukan secara mudah.
2. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Batam melalui kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah. Terdapat faktor pendukung dan penghambat, sebagai berikut:
 - a. Faktor Pendukung, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi segala peristiwa dasar yang mampu meningkatkan upaya perlindungan dan ketahanan pangan nasional dan daerah. Hal ini meliputi pihak kepentingan (pemerintah), komunikasi

yang efektif antara dinas dengan instansi terkait. Sedangkan faktor eksternal yaitu Sikapi penerima bantuan penyaluran kegiatan pengembangan cadangan pangan, lingkungan penerima bantuan yang mendukung, dan sikap mitra kerja yang koopearatif.

- b. Faktor Penghambat, terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah sumber daya manusia yang tidak memiliki kapasitas sesuai dengan standar yang berlaku, jumlah sumber daya manusia dan kemampuan dalam penggunaan teknologi. Sedangkan faktor eksternal meliputi yang minim lingkungan penerima bantuan yang tidak kooperatif, tidak tepat waktu, dan kurangnya dukungan dari perangkat daerah lokal sehingga pelayanan publik dan kualitasnya menjadi berkurang.

3.7 Metode Analisis Data

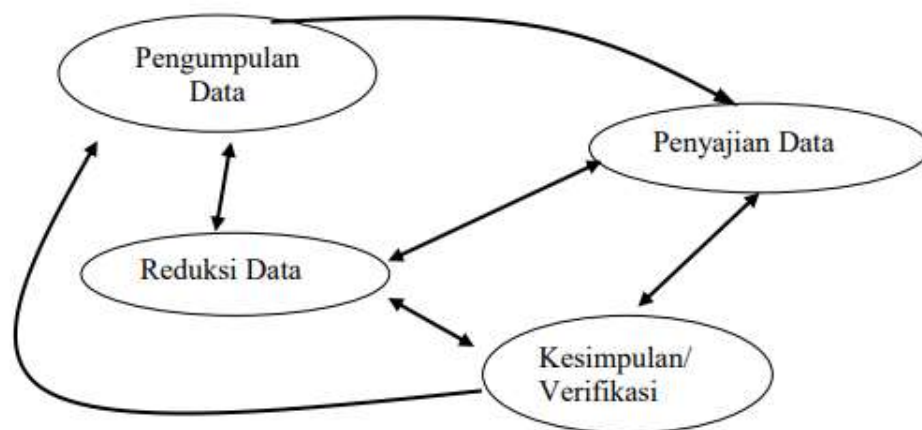
Menurut Sugiyono (2005) analisis data yang digunakan oleh peneliti merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam menemukan hasil penelitian. Hal ini membantu penelliti dalam menganalisis data penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti melakukan analisis secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga data yng diperoleh sudah sampai pada titik jenuh. Hasil analisisi disajikan agar mudah untuk dipahami, maka dari ini kami menggunakan mode analisis model interaktif dari Miles dan Hubermen (Miles & Huberman, 1992) untuk menemukan keselarasan penelitian yang lebih dalam dan maksimal.

1. Pengumpulan Data, merupakan tahapan pertama yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan dokumen lainnya

berdasarkan tujuan penelitian sehingga mampu untuk memecahkan permasalahan penelitian.

2. Reduksi Data, tahapan proses berfikir secara intensif dan memerlukan kecerdasan dan keeluasaan berpikir untuk menemukan kedalaman hasil penelitian. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan sampai penelitian selesai dilakukan.
3. Penyajian Data, dilakukan dalam bentuk deskripsi kalimat, rangkain tabel dan gambar, *flowchat* dan sejenisnya. Peneliti menggunakan metode dari Miles dan Huberman yang menyajikan data dalam model kualitatif dengan teks bersifat deskriptif naratif (Sugiyono, 2011).
4. Kesimpulan atau Verifikasi, temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan dalam bentuk deskripsi narasi dan gamabran penelitian yang belum sempurna dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Selain itu dapat juga berhubungan langsung secara klausal atau interaktif, hipotesisi dan atau teori.

Gambar 3. 1 Alur Analisis Data Berdasarkan Teori Sugiyono



Sumber: Sugiyono (2011)

Penelitian kualitatif dinyatakan valid apabila peneliti mampu mencapai suatu realitas hasil yang tetap, atau dinamis sesuai keadaan waktu tertentu yang kadang berubah-ubah karena perilaku sosial. Maka dari itu dilakuakn pengujian keabsahan penelitian kualitatif dalam bentuk beberapa tahap yang terdiri dari:

1. Uji Kredibilitas, yaitu uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan dan triangulasi hasil penelitian.
2. Pengujian Transferabilitas, adalah upaya untuk menilai penelitian orang lain yang dapat dilakuakn dengan rekan sejawat, pembimbing atau penguji untuk membandingkan pengalaman masing-masing.
3. Pengujian Dependabilitas, adalah kondisi dimana orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Hal ini dapat dilakukan oleh para editor dan orang yang memilliki kuasa secara independen atau pembimbing dengan mengedit secara keseluruhan dan aktifitas penelitian.
4. Pengujian Konfirmabilitas yaitu pengujian hasil penelitian yang disepakati oleh banyak orang. Pengujian ini dinilai relevan dan mirip dengan uji dependabilitas dan dapat berlangsung secara bersamaan